



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA PENGGUNAAN
ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (*AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE COOPERATION IN THE
PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Moskow, Rusia, pada tanggal 1 Desember 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Penggunaan Energi Atom untuk Maksud Damai (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic Energy*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Penggunaan Energi Atom untuk Maksud Damai (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic Energy*) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2006 di Moskow, Rusia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,



Bisrok Simbolon

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG
KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia (selanjutnya disebut sebagai Para Pihak),

BERMAKSUD untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua Pihak,

MEYAKINI bahwa kerjasama yang luas antara kedua Pihak di bidang penggunaan energi atom untuk maksud damai akan meningkatkan persahabatan dan saling pengertian,

MENYADARI bahwa penggunaan energi atom untuk maksud damai merupakan faktor penting dalam memastikan pembangunan sosial dan ekonomi di kedua Negara,

MEMPERTIMBANGKAN bahwa kedua negara adalah anggota Badan Energi Atom Internasional (selanjutnya disebut sebagai "IAEA"), Para Pihak pada Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1 Juli 1968 (selanjutnya disebut sebagai Traktat Non-Proliferasi),

BERDASARKAN undang-undang yang berlaku di kedua negara,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Para pihak mengembangkan dan memperdalam kerja sama di bidang penggunaan energi atom untuk maksud damai berdasarkan Persetujuan ini dan sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional yang berlaku bagi masing-masing negara sesuai dengan prioritas program nuklir nasional di masing-masing negara.

Pasal 2

Para Pihak akan melaksanakan kerjasama pada bidang-bidang sebagai berikut:

- a. pengembangan, model, pembangunan dan pengoperasian reaktor-reaktor penelitian dan pembangkit tenaga nuklir, termasuk pembangkit berkapasitas rendah sebagai contoh adalah pembangkit nuklir terapung, dan juga penelitian dan pengembangan yang terkait;
- b. reaktor-reaktor pendingin untuk gas temperatur bersuhu tinggi sebagai penghasil listrik dan panas bagi tujuan industri;
- c. penggunaan kekuatan nuklir untuk desalinasi laut dan artesi air;
- d. produksi hydrogen;
- e. produksi/manufaktur dan penggunaan radioisotope, instalasi radiasi dan akselerasi untuk penggunaan industri dan medis;
- f. pendidikan, pelatihan dan pelatihan tingkat lanjut bagi personel administratif, ilmiah dan teknis;
- g. pengawasan dan pengendalian negara mengenai permasalahan keselamatan nuklir dan radiasi;
- h. pemberian ijin atas aktivitas-aktivitas di bidang penggunaan energi atom untuk tujuan-tujuan damai;
- i. Bidang-bidang kerjasama lain yang disetujui Para Pihak

Pasal 3

Kerjasama yang disebutkan dalam Pasal 2 Persetujuan ini dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. melaksanakan penelitian bersama pada program-program yang telah disepakati;
- b. membentuk kelompok-kelompok kerja bersama untuk melaksanakan proyek di bidang penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi;
- c. pertukaran tenaga ahli;

- d. mengadakan seminar dan simposium;
- e. mengadakan konsultasi timbal balik mengenai isu-isu ilmiah dan teknis;
- f. memberikan bantuan pelatihan, pelatihan ulang dan pelatihan tingkat lanjut untuk personil-personil administratif, ilmiah dan teknis;
- g. memberikan material nuklir, peralatan nuklir dan menyediakan pelayanan-pelayanan;
- h. hubungan antar pejabat pemerintahan dari Para Pihak dalam pengaturan keselamatan nuklir dan radiasi dan pengawasan;
- i. pertukaran informasi ilmiah dan teknis di bidang-bidang yang disebutkan pada Pasal 2 Persetujuan ini;
- j. bentuk-bentuk kerjasama yang lain yang mungkin ditambahkan dan disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 4

Untuk melaksanakan ketentuan pada persetujuan ini, Para Pihak menunjuk badan yang berwenang:

- a. Atas nama Pihak Indonesia - Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia;
- b. Atas nama Pihak Rusia- Badan Tenaga Atom Federal.
- c. Para Pihak segera memberitahukan satu sama lain melalui jalur diplomatik jika terjadi perubahan badan yang berwenang

Pasal 5

Kerjasama dalam Persetujuan ini juga mempertimbangkan keterlibatan organisasi pemerintahan dan swasta.

Pasal 6

Kerjasama dalam persetujuan ini melalui pembentukan kontrak-kontrak dan/atau pengaturan-pengaturan yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari organisasi-organisasi yang terlibat dan juga kondisi khusus dari kerjasama.

kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan permasalahan hukumnya, yang diberikan atau dibuat berdasarkan Persetujuan ini. Permasalahan perlindungan dan pendistribusian hak atas kekayaan intelektual termasuk perlindungan atas hak yang sah dari Pihak ketiga, dengan mempertimbangkan porsi kepemilikan yang sama berdasarkan kontribusi masing-masing peserta program, yang diatur oleh Persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh organisasi-organisasi Para Pihak pada bidang-bidang khusus kerjasama.

Pasal 9

Para Pihak memberi bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Persetujuan ini, termasuk untuk masuk dengan tidak dihalangi, menetap dan meninggalkan negara sesuai dengan peraturan nasional Para Pihak.

Pasal 10

- a. Eksport materi nuklir, peralatan nuklir, materi non-nuklir khusus dan teknologi terkait dalam Persetujuan ini dilaksanakan sesuai dengan kewajiban Para Pihak dalam Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir pada 1 Juli 1968, dan juga persetujuan-persetujuan internasional yang lain dan pengaturan-pengaturan mengenai pengawasan eksport dimana Republik Indonesia dan Federasi Rusia merupakan pihak.
- b. Material nuklir, peralatan nuklir, material non-nuklir khusus dan teknologi-teknologi terkait yang didapatkan oleh Para Pihak berdasarkan Persetujuan ini dan juga nuklir dan materi non-nuklir khusus, instalasi, dan peralatan yang dihasilkan sebagai hasil dari pelaksanaan persetujuan ini:
 - 1) tidak dapat digunakan untuk menghasilkan senjata nuklir dan peralatan nuklir yang eksplosif atau untuk keperluan militer yang lain;
 - 2) dilengkapi dengan langkah-langkah perlindungan fisik dengan tingkat yang tidak lebih rendah dari rekomendasi Badan Energi Atom Internasional;
 - 3) dieksport, dieksport ulang dari yurisdiksi Negara Para Pihak hanya dengan syarat dan ketentuan dari Pasal ini dan merupakan subjek perlindungan Badan Energi Atom Internasional berdasarkan persetujuan mengenai perlindungan yang sesuai.

- c. Pihak Indonesia tidak dapat menggunakan peralatan, materi dan teknologi yang berfungsi ganda yang diperoleh dari Federasi Rusia dan digunakan untuk tujuan-tujuan nuklir atau untuk memproduksi duplikat-duplikat untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemroduksian peralatan nuklir yang eksplosif atau di bidang siklus bahan bakar nuklir yang bukan merupakan subjek perlindungan Badan Energi Atom Internasional.

Pasal 11

- a. Materi nuklir yang dikirimkan ke Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan ini, juga materi nuklir yang dihasilkan dari penggunaan materi, peralatan, atau teknologi terkait yang dikirim berdasarkan Persetujuan ini merupakan subjek perlindungan Badan Energi Atom Internasional yang sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Badan Energi Atom Internasional mengenai pelaksanaan perlindungan sesuai Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir pada 14 Juli 1980.
- b. Materi nuklir yang dikirimkan ke Federasi Rusia berdasarkan Persetujuan ini, juga materi nuklir lain yang dihasilkan oleh penggunaan materi, peralatan atau teknologi terkait, jika dimungkinkan, diletakkan di bawah perlindungan Badan Energi Atom Internasional yang sesuai dengan Persetujuan antara Republik Sosial Uni Soviet dan Badan Energi Atom Internasional mengenai pelaksanaan perlindungan di Republik Sosial Uni Soviet pada 21 Februari 1985.

Pasal 12

Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi, negosiasi atau prosedur lain yang disetujui Para Pihak.

Pasal 13

- a. Persetujuan ini berlaku pada tanggal pertukaran pemberitahuan tertulis yang terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan internal mereka untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi.
- b. Persetujuan berlaku selama jangka waktu sepuluh (10) tahun, dan secara otomatis diperpanjang untuk lima (5) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak secara tertulis memberitahukan kepada Pihak yang lain

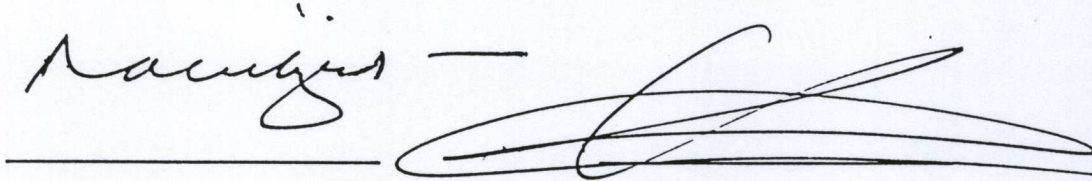
keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

- c. Pengakhiran persetujuan ini tidak akan mempengaruhi validitas dan durasi kontrak -dan/atau pengaturan yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini hingga selesainya kontrak dan/ atau pengaturan tersebut.
- d. Jika persetujuan ini diakhiri, kewajiban Para Pihak dalam Pasal 8, 10, dan 11 Persetujuan ini tetap berlaku kecuali Para Pihak menyepakati lain.
- e. Persetujuan ini dapat diamandemen dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Amandemen Persetujuan ini berlaku sesuai dengan paraturan pada ayat 1 pasal ini.

DIBUAT di Moskow pada hari pertama Desember 2006 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia dan bahasa Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH
FEDERASI RUSIA**

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is for the Indonesian representative, and the signature on the right is for the Russian representative. Both signatures are written in black ink and are positioned above horizontal lines that serve as baselines for the signatures.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Индонезии
и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве
в области мирного использования атомной энергии

Правительство Республики Индонезии и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

желая укрепить дружественные отношения, существующие между Сторонами,

будучи убежденными в том, что расширение сотрудничества между Сторонами в области мирного использования атомной энергии способствует дальнейшему развитию дружбы и взаимопонимания,

сознавая, что мирное использование атомной энергии является важным фактором в деле обеспечения социально-экономического развития обоих государств,

принимая во внимание тот факт, что оба государства являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г. и членами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),

руководствуясь законодательством своих государств,
согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны развивают и углубляют сотрудничество в области мирного использования атомной энергии на основе настоящего Соглашения и при соблюдении законодательства и международных договоров своих государств в соответствии с приоритетами своих национальных программ в области мирного использования атомной

энергии.

Статья 2

Стороны сотрудничают в следующих областях:

разработка, проектирование, строительство и эксплуатация исследовательских реакторов и атомных электростанций, в том числе атомных электростанций малой мощности, к которым относятся плавучие атомные электростанции, а также проведение связанных с ними научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы для выработки электроэнергии и тепла для промышленных целей;

использование атомной энергии для опреснения морских и артезианских вод;

производство водорода;

производство и применение радиоизотопов, установок и ускорителей для облучения в промышленности и медицине;

обучение, подготовка и повышение квалификации административного и научно-технического персонала;

государственное регулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности;

лицензионная деятельность в области использования атомной энергии в мирных целях;

другие области сотрудничества, которые могут быть дополнительно согласованы обеими Сторонами.

Статья 3

Сотрудничество, предусмотренное в статье 2 настоящего

Соглашения, осуществляется в следующих формах:

проведение совместных исследований по согласованным программам;

создание совместных рабочих групп для осуществления проектов в области научных исследований и разработки технологий;

обмен экспертами;

проведение семинаров и симпозиумов;

проведение взаимных консультаций по научно-техническим вопросам;

оказание содействия в организации стажировок, в подготовке, переподготовке и повышении квалификации административного и научно-технического персонала;

поставка ядерных материалов, оборудования и предоставление соответствующих услуг;

взаимодействие между органами власти государств Сторон по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопасности;

обмен научной и технической информацией по направлениям, перечисленным в статье 2 настоящего Соглашения;

другие формы сотрудничества, которые могут быть дополнительно согласованы Сторонами.

Статья 4

Для реализации положений настоящего Соглашения Стороны назначают следующие компетентные органы:

с Индонезийской Стороны - Национальное агентство по атомной энергии и Совет по управлению атомной энергией Республики Индонезии;

с Российской Стороны – Федеральное агентство по атомной энергии.

Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам в случае изменения своих компетентных органов.

Статья 5

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения предполагает участие государственных и частных организаций.

Статья 6

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется путем заключения договоров, которые определяют права и обязанности заинтересованных организаций, конкретные условия сотрудничества.

Статья 7

1. Для контроля и координации работ, выполняемых в рамках настоящего Соглашения, проведения консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес и связанным с сотрудничеством в области мирного использования атомной энергии, создается совместный координационный комитет, состоящий из представителей, назначаемых компетентными органами Сторон.

Заседания совместного координационного комитета проводятся по мере необходимости поочередно в Республике Индонезии и Российской Федерации.

2. При необходимости компетентные органы Сторон могут создавать рабочие группы.

3. Рабочие группы проводят свои заседания с целью обсуждения мер по выполнению настоящего Соглашения и для обмена информацией по вопросам реализации совместных программ, проектов и осуществления другой деятельности, представляющей взаимный интерес.

Статья 8

1. В рамках настоящего Соглашения обмен секретной информацией Республики Индонезии и информацией, составляющей государственную тайну Российской Федерации, не осуществляется.

2. Информация, передаваемая в соответствии с настоящим Соглашением или создаваемая в результате его выполнения и рассматриваемая каждой Стороной как конфиденциальная, четко определяется и обозначается как таковая.

В соответствии с законодательством Республики Индонезии такая информация называется конфиденциальной информацией.

В соответствии с законодательством Российской Федерации такая информация называется информацией для служебного пользования.

3. Обращение с информацией, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством государства Стороны, получающей информацию, и эта информация не разглашается и не передается третьей стороне без письменного разрешения Стороны, передающей такую информацию.

4. Стороны в соответствии с законодательством своих государств обеспечивают эффективную защиту и распределение прав на интеллектуальную собственность, передаваемую или создаваемую в соответствии с настоящим Соглашением. Вопросы защиты и распределения прав на интеллектуальную собственность регулируются договорами, заключаемыми организациями Сторон по конкретным направлениям сотрудничества.

Статья 9

Стороны оказывают содействие и необходимую поддержку организациям, участвующим в реализации настоящего Соглашения, включая содействие беспрепятственному въезду, пребыванию и выезду из государства в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 10

1. Экспорт ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с обязательствами государств Сторон, вытекающими из Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г., а также из других международных договоров и договоренностей в области экспортного контроля, участниками которых являются Российская Федерация и/или Республика Индонезия.

2. Ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные материалы и соответствующие технологии, полученные Сторонами в соответствии с настоящим Соглашением, а также произведенные на их

гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия от 14 июля 1980 г.

2. Ядерные материалы, переданные Российской Федерации в рамках настоящего Соглашения, а также любые ядерные материалы, произведенные в результате использования материалов, оборудования или соответствующих технологий, будут, где это применимо, находиться под гарантиями в соответствии с Соглашением между Союзом Советских Социалистических Республик и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в Союзе Советских Социалистических Республик от 21 февраля 1985 г.

Статья 12

Любые спорные вопросы или разногласия, связанные с толкованием или выполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций, переговоров или другими способами, согласованными Сторонами.

Статья 13

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.

2. Настоящее Соглашение действует в течение 10 лет и автоматически продлевается на последующие 5 лет, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения не менее чем за 6 месяцев

до истечения срока действия Соглашения.

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на действие договоров, заключенных в рамках настоящего Соглашения, вплоть до их исполнения.

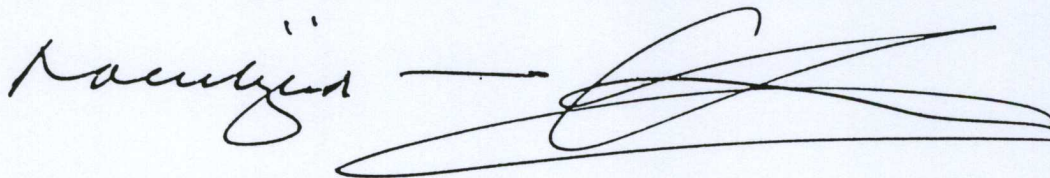
4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения обязательства Сторон, предусмотренные в статьях 8, 10 и 11 настоящего Соглашения, остаются в силе, если Стороны не договорятся об ином.

5. С письменного согласия Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, вступают в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Совершено в г. Москве 1 декабря 2006 г. в двух экземплярах, каждый на индонезийском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае расхождения в толковании текстов используется текст на английском языке.

За Правительство
Республики Индонезии

За Правительство
Российской Федерации



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
ON
THE COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Parties),

DESIRING to strengthen the friendly relations existing between the Parties,

BEING CONVINCED that broadening of the cooperation between the Parties in the field of peaceful uses of atomic energy contributes to the further development of friendship and mutual understanding,

REALIZING that the use of atomic energy for peaceful purposes is an important factor in ensuring social and economic development of both states,

TAKING INTO ACCOUNT that both countries are the Member States of the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the "IAEA"), the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of July 1, 1968 (hereinafter referred to as the Non-Proliferation Treaty),

PURSUANT TO laws and regulations in their states,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

The Parties shall develop and deepen the cooperation in the field of peaceful use of atomic energy based on this Agreement and in compliance with the legislation and international treaties of their respective states according to the priorities of their national nuclear programs in the field of peaceful uses of atomic energy.

Article 2

The Parties shall cooperate in the following areas:

- a. development, design, construction and operation of research reactors and nuclear power plants, including low power capacity plants represented by floating nuclear power plants, as well as research and development work related to the above;

- b. high temperature gas cooled reactors for generations of electricity and heat for industrial purposes;
- c. use of nuclear power for desalination of sea and artesian water;
- d. hydrogen production;
- e. production/manufacture and use of radioisotopes, irradiation installation and accelerators for industrial and medical applications;
- f. education, training and advanced training of administrative, scientific and technical personnel;
- g. state supervision and control over nuclear and radiation safety issues;
- h. licensing activities in the field of use of atomic energy for peaceful purposes;
- i. Other areas of cooperation as may be mutually agreed upon by the Parties.

Article 3

The cooperation provided for in Article 2 of this Agreement shall be undertaken in the following forms:

- a. conducting joint researches on agreed programs;
- b. establishing joint working groups to implement projects in the field of scientific researches and technology development;
- c. exchange of experts;
- d. holding seminars and symposia;
- e. carrying out mutual consultations on scientific and technical issues;
- f. providing assistance in training, retraining and advanced training of administrative, scientific and technical personnel;
- g. supply of nuclear materials, equipment and providing services;
- h. interaction between governmental authorities of the Parties in nuclear and radiation safety regulation and supervision;

- i. exchange of scientific and technical information in the areas listed in Article 2 of this Agreement;
- j. other forms of cooperation as may be additionally agreed by the Parties.

Article 4

To implement the provisions of this Agreement, the Parties shall appoint competent authorities:

- a. On behalf of the Indonesian Party - the National Nuclear Energy Agency and the Nuclear Energy Regulatory Agency of the Republic of Indonesia;
- b. On behalf of the Russian Party - the Federal Atomic Energy Agency;
- c. The Parties shall immediately notify each other by diplomatic channels in case of any changes to their competent authorities.

Article 5

Cooperation under this Agreement also envisages participation of governmental and private organizations.

Article 6

The cooperation under this Agreement shall be implemented by means of concluding contracts determining the rights and obligations of participating organizations as well as specific conditions of the cooperation.

Article 7

- a. The Parties shall establish a Joint Coordinating Committee composed of the representatives designated by the competent authorities of the Parties to control and coordinate work implemented under this Agreement, and to consult on the issues of mutual interest related to cooperation in the field of peaceful of atomic energy.

The Joint Coordinating Committee meetings shall be held as necessary alternately in the Republic of Indonesia and in the Russian Federation.

- b. Under this Agreement the competent authorities of the Parties may, if required, establish Working Groups.
- c. The Working Groups shall hold their meetings with the aim to discuss specific measures related to the implementation of this Agreement and to

exchange the information on the progress of joint programs, projects and other activities of mutual interest.

Article 8

- a. Within the framework of the Agreement the Parties shall not exchange secret information of the Republic of Indonesia or information that constitutes state secret of the Russian Federation.
- b. Information being transmitted in accordance with the Agreement of created as a result of its implementation and considered by either Party as confidential shall be clearly defined and marked such:
 - 1) In accordance with the legislation of the Republic of Indonesia such information shall be termed as confidential information;
 - 2) In accordance with the legislation of the Russian Federation such information shall be termed as information for official use only.
- c. The termination, as per paragraph 2 of this article, shall be handled in accordance with the state legislation of the Party receiving the information. This information shall not be disclosed or transmitted to a third Party without written consent of the Party transmitting such information.
- d. In accordance with the legislation of their states the Parties shall provide efficient protection and distribution of intellectual property right which are being transferred or created in accordance with this Agreement. The issues of protection and distribution of intellectual property right shall be regulated by the agreements conclude by organizations of the parties on specific areas of cooperation.

Article 9

The Parties shall render assistance and necessary support to organizations which participate in the implementation of this Agreement including support to the unimpeded entry, stay and departure from the state in accordance with the national legislation of the Parties.

Article 10

- a. Export of nuclear materials, equipment, special non-nuclear materials and related technologies on this Agreement shall be done in conformity with the obligations of the Parties pursuant to the Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons of July 1, 1968, as well as other international treaties and arrangements in export controls in which the Republic of Indonesia and/or the Russian Federation are parties to.

Article 12

Any dispute or disagreement arising out on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation, negotiations or other procedures agreed upon by the Parties.

Article 13

- a. The Agreement shall enter into force upon the date of the latest exchange of written notification of the completion by the Parties of the internal procedures required for this Agreement to be entered into force.
- b. The Agreement shall remain in force for the period of ten (10) years and shall be automatically extended for the next five (5) years periods unless either Party notifies the other Party in writing of its intention to terminate this Agreement at least six (6) months prior to the expiration of this Agreement.
- c. The termination of this Agreement shall not affect the validity of any contracts concluded under this Agreement until their completion
- d. In case of termination of this Agreement, obligations of the Parties under Article 8,10 and 11 of this Agreement shall remain in force unless otherwise agreed upon by the Parties.
- e. The Agreement may be amended and supplemented by written consent of the Parties. Any amendment introduced into this Agreement shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article.

DONE at Moscow on this 1st day of December 2006 in duplicate, each in the Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE RUSSIAN FEDERATION**

